

SKRIPSI

**RELASI PERTUKARAN SOSIAL ANTARA PEMILIH DENGAN
KANDIDAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KORE
KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA TAHUN 2020**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**RELASI PERTUKARAN SOSIAL ANTARA PEMILIH DENGAN
KANDIDAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KORE
KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA TAHUN 2020**

Disusun dan diajukan Oleh :

MUHAMMAD RAHMAT ANSYARI
NIM : 218130105T

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Skripsi
Mataram,

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN. 0008075914



Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0809038902

Mengetahui,
Ketua program studi
Ilmu pemerintahan



Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

**RELASI PERTUKARAN SOSIAL ANTARA PEMILIH DENGAN
KANDIDAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KORE
KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA TAHUN 2020**

Disusun dan diajukan Oleh :

MUHAMMAD RAHMAT ANSYARI
NIM : 218130105T

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi pada tanggal 9 Agustus dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

1. **Drs. H. Darmansyah, M.Si**
NIDN. 0008075914

(PU) 

2. **Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP**
NIDN. 0809038902

(PP) 

3. **Lalu Sopan Tirta Kusuma S.IP.,M.Si**
NIDN. 0831126204

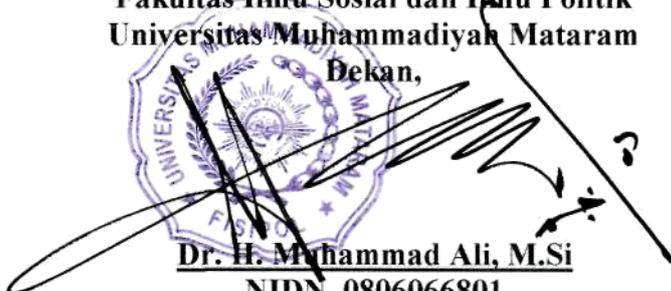
(PN) 

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP
NIDN.0809038902

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : MUHAMMAD RAHMAT ANSYARI

Nim : 218130105T

Judul Skripsi : “RELASI PERTUKARAN SOSIAL ANTARA PEMILIH
DENGAN KANDIDAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KORE
KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA TAHUN 2020”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Karya tulis saya dalam hal ini skripsi tersebut asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram, maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak dapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas telah saya cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya ini, dan sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram 9 Agustus 2021



Muhammad Rahmat Ansyari

Nim.218130105T



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rahmat Ansyari
NIM : 2101301057
Tempat/Tgl Lahir : Kore 19 Oktober 1996
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FKIP
No. Hp/Email : 081 916 023 279 / muhammadrahmatansyari174@gmail.com
Judul Penelitian : -

Relasi Pertukaran Sosial Antara Pemilih Dengan Kandidat Pada
Pemilihan Kepala Desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar
Kabupaten Bima tahun 2020

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 42%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Agustus 2021

Penulis



Muhammad Rahmat Ansyari
NIM. 2101301057

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rahmat Ansyari
NIM : 2181301051
Tempat/Tgl Lahir : Kore 19 Oktober 1996
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fisip
No. Hp/Email : ~~081~~ 081 910 023 279
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Relasi Pertukaran Sosial Antara Pemilih dengan Kandidat
pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar
Kabupaten Bima tahun 2020

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Agustus 2021

Penulis



Muhammad Rahmat Ansyari
NIM. 2181301051

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

CURRICULUM VITAE



❖ DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Rahmat Ansyari

Tempat / Tanggal Lahir : Kore, 19 Oktober 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Nomor HP : 087859453736

Alamat : Jl. Kh. Ahmad Dahlan Gang Melati Kelurahan Pagesangan

❖ RIWAYAT PENDIDIKAN:

- SDN 1 Sori Panihi (2002-2008)
- SMPN Negeri 1 Tambora (2008-2011)
- SMA Negeri 1 Tambora (2011-2014)

MOTTO

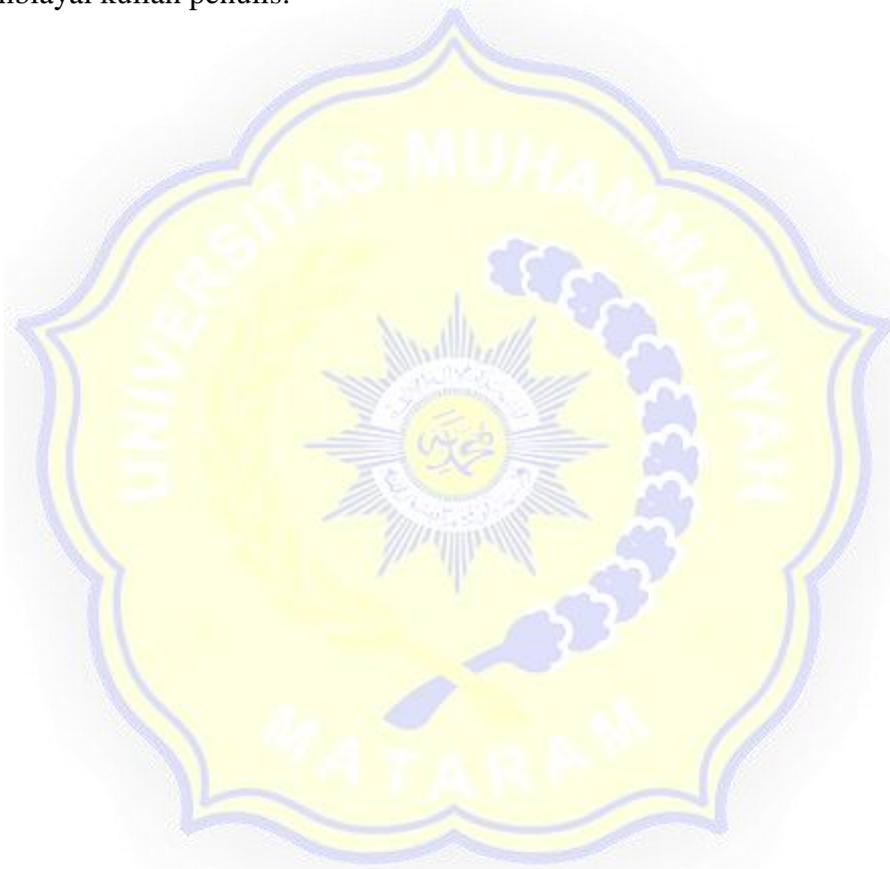
"Kamma Tadinu Tuudaan"

"Do'a Adalah Kunci Semua Kebaikan"



PERSEMBAHAN

Allhamdulillah, senantiasa diucapkan atas setiap kemudahan yang diberikan ALLAH SWT terhadap keberhasilan dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Universitas Muhammdiyah Mataram sehingga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk selalu saya syukuri. Skripsi ini di persembahkan kepada kedua orang yang senantiasa menasehati dan yang telah bersusah payah membiayai kuliah penulis.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, senantiasa diucapkan atas setiap kemudahan yang diberikan Allah SWT kepada penulis untuk bisa menyelesaikan amanah dalam penulisan proposal ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal yang berjudul **“Relasi Pertukaran Sosial Antara Pemilih Dengan Kandidat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2020 ”** tepat pada waktunya. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan bagi kita semua umatnya dan sebagai sumber inspirasi umat islam untuk terus selalu berjuang dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara belajar dan menuntut ilmu.

Penulisan Proposal ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani., M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan hingga proposal ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.Si selaku pembimbing utama yang telah membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku pembimbing Kedua yang telah membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Umumnya Dan Khususnya Dosen-Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kedua Orang Tua Tercinta yang telah memberikan banyak sekali dukungan baik moril maupun materi.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapatkan imbalan disisi Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin.

Penulis sebagai manusia biasa luput dari kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu apabila terdapat kekurangan dalam penulisan proposal ini, baik dari segi penyajian isi maupun tata bahasa, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang membangun demi perbaikan selanjutnya. Akhir kata penulis hanya dapat berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis pribadi dan bagi pembaca pada umumnya.

Mataram, 27 Januari 2021

Penulis

MUHAMMAD RAHMAT ANSYARI
218130105T

**RELASI PERTUKARAN SOSIAL ANTARA PEMILIH DENGAN
KANDIDAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KORE
KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA TAHUN 2020**

MUHAMMAD RAHMAT ANSYARI

NIM.218130105T

**Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**

Abstract

Skripsi ini membahas tentang bagaimana relasi pertukaran sosial antara pemilih dengan kandidat pada pemilihan kepala desa di desa kore kecamatan sanggar kabupaten bima tahun 2020 dimana penelitian ini menangkat bagaimana relasi pertukaran sosial antara pemilih dengan kandidat, metode yang digunakan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian memyatakan bahwa relasi pertukaan sosial antara pemilih dengan kandidat pada pemilihan kepala desa di desa kore kecamatan sanggar kabupaten bima tersebut berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati sebelumnya antara Calon Kepala Desa dengan masyarakat. Karna di dasari dengan adanya pengaruh dari para kerabat Calon Kepala Desa yang memiliki nama besar di kalangan masyarakat Desa, sehingga masyarakat pemilih akan selalu melihat kepada kerabat Calon Kepala Desa yang telah memberikan pemberian yang memang pemberian tersebut tidaklah gratis melainkan ada pertukaran di dalamnya, pemberian barang sebagai hadiah (*reward*) serta keuntungan yang di dapatkan oleh masyarakat penerima akan menjadi sebuah upaya mempengaruhi pilihan mereka terhadap keluarga pemberi yang menjadi Calon Kepala Desa.

Kata kunci: *Relasi Pertukaran Sosial Antara Pemilih Dengan Kandidat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Sesa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima*

**RELATIONSHIPS OF SOCIAL EXCHANGE BETWEEN VOTER AND
CANDIDATES IN VILLAGE HEAD ELECTION IN KORE,
SANGGAR, BIMA REGENCY IN 2020**

MUHAMMAD RAHMAT ANSYARI

NIM. 218130105T

Government Science Study Program
Faculty of Social and Political Science
Muhammadiyah University of Mataram

Abstract

This thesis examines the social exchange relationship between voters and candidates in the village head election in Kore village, Sanggar, Bima district in 2020. This study employed descriptive qualitative method. Data was collected by documentation, interviews, and observations. According to the study's findings, the social exchange interaction between voters and candidates in the village head election in Kore village, Sanggar, Bima district, followed the previously agreed upon agreement between the Village Head Candidates and the community. It was because swayed by the family of the Village Head Candidates, who are well-known in the village, as a result of the community's loyalty to the relatives of the Village Head Candidates who have offered several gifts. Of course, the present is not free, but there is an exchange: the giving of products as a gift (reward) and the benefits acquired by the receiving community will be an attempt to influence their choice of the giver's family as a Village Head Candidate.

Keywords: *Social Exchange Relations between Voters and Candidates in Village Head Elections in Kore Village, Sanggar District, Bima Regency*



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iv |
| BEBAS PLAGIASI | v |
| PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | vi |
| CURRICULUM VITAE..... | vii |
| MOTO | viii |
| PERSEMBAHAN..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis | 6 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis..... | 7 |
| 1.4.3 Manfaat Akademis..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 8 |
| 2.2 Landasan Teori | 13 |
| 2.2.1 Pertukaran Sosial | 13 |
| 2.2.2 Syarat-Syarat Pertukaran Sosial Dalam Perspektif Teori | |

| | |
|--|-----------|
| Pertukaran..... | 14 |
| 2.2.3 Bentuk-Bentuk Pertukaran Pertukaran Sosial | 15 |
| 2.2.4 Teori Pertukaran (Exchange Teori) | 17 |
| 2.3 Kerangka Pikir..... | 19 |
| 2.4 Definisi Konseptual..... | 20 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 21 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 21 |
| 3.2 Lokasi Penelitian..... | 22 |
| 3.3 Waktu Penelitian | 22 |
| 3.4 Tehnik Penentuan Narasumber | 22 |
| 3.5 Jenis Data | 23 |
| 3.5.1 Data Primer | 23 |
| 3.5.2 Data Skunder..... | 24 |
| 3.6 Tehnik Pengumpulan Data..... | 25 |
| 3.6.1 Observasi..... | 25 |
| 3.6.2 Wawancara/Interview | 25 |
| 3.6.3 Dokumentasi | 26 |
| 3.7 Tehnik Analisis Data..... | 26 |
| 3.7.1 Reduksi Data | 26 |
| 3.7.2 Penyajian Data | 26 |
| 3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi..... | 27 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 28 |
| 4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian | 28 |

| | |
|---|-----------|
| 4.1.1. Sejarah Pemerintahan Desa Kore | 28 |
| 4.1.2 Sosial Budaya Desa Kore..... | 29 |
| 4.1.3. Kondisi dan Struktur Demografi | 31 |
| 4.1.4. Kondisi Umum Geografis Desa Kore | 32 |
| 4.1.5 Pemerintahan Umum..... | 33 |
| 4.1.6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kore | 34 |
| 4.1.7 Prasarana Dan Sarana Desa Kore..... | 36 |
| 4.2 Hasil dan Pembahasan | 39 |
| 4.2.1 Relasi Pertukaran Sosial Antara Pemilih Dengan Kandidat Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima..... | 39 |
| BAB V PENUTUP | 76 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 76 |
| 5.2 Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prinsip otonomi desa mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan. Namun sebagai catatan, prinsip daerah otonomi ini berbeda dengan prinsip wilayah merdeka. Sebagai daerah otonom desa memang memiliki berbagai kebebasan untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran warganya dalam bingkai konstitusi yang berlaku di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian otonomi yang diberikan kepada desa dalam penyelenggaraan pengelolaan desa masih dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan tata urutan perundangan di Indonesia serta aturan-aturan lain yang berlaku. Hal tersebut berakibat yang mengikat dan membatasi kewenangan desa dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya di wilayahnya demi tercapainya pembangunan dalam suatu desa. Sebagai wujud timbal baliknya, maka Pemerintah Republik Indonesia seyogyanya telah mengakomodasi kepentingan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional agar desa menjadi ukuran dalam kemajuan dalam perekonomian di

masyarakat setempat. Sehingga munculah berbagai macam produk kebijakan yang ditujukan untuk menata penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana berdasarkan prinsip desentralisasi sebagian besar kewenangan penataan penyelenggaraan pemerintahan desa diserahkan kepada pemerintahan di level kabupaten.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah daerah menganut asas otonomi dan tugas pembantuan, memberi kesempatan pada daerah untuk mengurus dan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai pemerintah pusat sehingga pihak-pihak pemerintah harus mengambil tindakan langsung kepada masyarakat.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam Pasal 33 huruf g, membahas tentang pemilihan kepala desa (Pilkades) dimana pemerintah kabupaten diberi hak penuh untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa dengan membuat panitia di tingkat kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah Dalam Negri (PERMENDAGRI), Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Perubahan Aturan, tentang pemilihan kepala desa,

(Pilkades), menyebutkan beberapa pokok pasal yang mengatur jalannya tahapan pemilihan, pada butir pertama bupati/wali kota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota. Kedua tugas panitia pemilihan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) meliputi, merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa, menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara, memfasilitasi pencetakan surat suara dan kotak suara dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hasil pemilihan.

Pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab mengatur desanya agar menjadi baik serta terciptanya tujuan bersama rakyat sekitar, sehingga warga bisa hidup nyaman dan tentram. Tugasnya sebagai kepala desa tidak sama dengan presiden karena kepala desa bisa mengenal langsung dengan warga yang berada di desa tersebut tetapi presiden hanya interaksi dengan rakyat luas sehingga belum mengenal langsung dengan warganya.

Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa bagian terbesar masyarakat Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan. Dengan demikian dapat dikatakan penduduk daerah pedesaan merupakan suatu modal dasar bagi pembangunan nasional, yang dimiliki oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Jumlah penduduk

daerah pedesaan yang sangat besar itu, apabila dapat dibina dengan baik, merupakan tenaga kerja yang efektif bagi berbagai kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perhatian yang besar perlu diberikan pada peningkatan pembangunan daerah pedesaan, terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat.

Tata cara pemilihan kepala desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten Bima. Dalam hal ini PERBUP No 2 Tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.

Terlepas dari pada itu, dalam sistem pemerintah desa, kepala desa di pilih langsung oleh masyarakat desa dari calon yang memenuhi syarat serta mempunyai suara terbanyak. Di desa kore rata-rata masyarakat sudah tahu dan mengenal calon yang akan bertarung dalam pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pertengahan bulan Agustus tahun 2020. Desa kore merupakan desa yang nilai perekonomiannya terdapat dari hasil pertanian dan nelayan. Pada tahun 2020, masyarakat desa kore memberikan hak suara dalam pemilihan kepala desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2020.

Dalam Pemilihan Kepala Desa, tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dalam sistem pemilihan kepala desa (Pilkades) telah menambah semaraknya pemilihan kepala desa di dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi. Demokrasi pemerintahan desa yang merupakan sistem penyelenggaraan pemerintah yang bersifat otonom, dan berwenang

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat.

Meskipun begitu, dalam pemilihan-pemilihan kepala desa di beberapa daerah tentu relasi pertukaran sosial antara pemilih dengan kandidat pada pemilihan kepala desa masih sangat massif dilakukan. Relasi-relasi tersebut bisa dalam bentuk transaksi politik, kekuasaan dan lain sebagainya. Dari sisi lain, sebab terjadinya transaksi politik praktis atau hubungan “pertukaran yang saling mendapatkan keuntungan” tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat yang berpendapatan rendah, (kondisi kemiskinan). Salah satu dari kesimpulan Zuber (2012) dalam Liata (2020:81) mengenai kemiskinan, ia mengatakan bahwa “kemiskinan adalah fungsional dalam sistem sosial karena menekankan status-status dalam masyarakat yang di nilai dapat menunjang kesinambungan masyarakat.

Hal tersebut juga terjadi pada pemilihan kepala desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Dimana terdapat transaksi politik praktis yang dilakukan oleh para calon kandidat yang menjadi calon kepala desa pada pemilihan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, “**Relasi Pertukaran Sosial Antara Pemilih Dengan Kandidat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2020?**” dengan harapan memperkaya literatur, pengetahuan dan wawasan mahasiswa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : yakni **“Bagaimana Relasi Pertukaran Sosial Antara Pemilih Dengan Kandidat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2020?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni, untuk mengetahui bagaimana **Relasi Pertukaran Sosial Antara Pemilih Dengan Kandidat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2020?**

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini di uraikan secara teoritis, dan secara praktis, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menambah keilmuan khususnya dalam melihat relasi pertukaran sosial antara pemilih dengan kandidat yang terjadi di kalangan masyarakat di tingkat desa khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melihat relasi pertukaran sosial antara pemilih dengan kandidat yang terjadi di kalangan masyarakat di tingkat desa maupun tingkat daerah umumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan informasi dalam mengidentifikasi masalah relasi pertukaran sosial antara pemilih dengan kandidat yang terjadi di kalangan masyarakat desa kore.
- b) Diharapkan hasil penelitian bisa menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian dengan studi kasus yang sama baik di tingkat desa dan tingkat lebih luasnya pada pemilihan kepala daerah.

1.4.3 Manfaat Akademis

Sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdyah Mataram.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| No | Judul Penelitian/ Tahun | Nama Peneliti | Hasil Penelitian | Metode |
|----|--|---------------|--|--|
| 1. | Relasi Pertukaran Sosial antara Masyarakat dan Partai Politik/2020 | Nofal Liata | Pola hubungan pertukaran sosial saling mendapatkan keuntungan bagi partai politik dengan masyarakat, ada dua kelompok yang berkepentingan dalam konteks ini, (1) elit partai politik berkepentingan ke masyarakat, dan (2) masyarakat desa berkepentingan ke partai politik. Bentuk kepentingan elit partai mendapatkan dukungan suara banyak saat pemilu. Demikian juga kepentingan masyarakat, harus mendatangkan manfaat langsung ke desa. Dua kepentingan ini bertemu dalam ruang negosiasi politik transaksional. | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali data lebih mendalam. |

| Persamaan/Perbedaan | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|---|
| <p>penelitian ini memiliki Kesamaan dengan penelitian penulis mengenai pembahasan mengenai pertukaran. Perbedaan penelitian penulis ini membahas tentang relasi pertukran sosial antara kandidat pada pemilihan kepala desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2020.</p> | | | | |
| 2 | <p>Pertukaran Sosial Elit Pendukung dan Pasangan Calon Pada Pilkada: Studi Kasus Kemenangan Syahto Pada Pilkada Tulungagung 2018</p> | <p>Mohamma d Hamdan Asrorudin</p> | <p>Hubungan antar inividu maupun kelompok tidak lepas dari adanya pertukaran sosial, dalam berbagai lini kehidupan termasuk dalam konteks perpolitikan. Salah satu contoh terjadi pada pemilihan bupati Tulungaggung 2018. Meskipun calon bupati terkena operasi tangkap tangan KPK namun masih mampu memenangkan kontestasi dengan selisih suara yang signifikan.</p> | <p>Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu temuan-temuan dalam penelitian di analisis dengan kata-kata atau kalimat. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah <i>kualitatif deskriptif</i> yang bertujuan Mengumpulkan informasi ataupun data Untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis</p> |
| Persamaan/Perbedaan | | | | |
| <p>Penelitian ini memiliki Kesamaan Hubungan antar inividu maupun kelompok tidak lepas dari adanya pertukaran sosial, dalam berbagai lini kehidupan termasuk dalam konteks perpolitikan. Perbedaan penelitian penulis ini membahas tentang relasi pertukran sosial antara kandidat pada pemilihan kepala desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2020.</p> | | | | |
| 3 | <p>Perspektif Pertukaran Sosial dalam Perilaku Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Malang 2013</p> | <p>Wimmy Haliim</p> | <p>Masyarakat memerlukan pengetahuan politik yang cukup untuk bisa menentukan perilaku dan budaya politik baik. Namun, pertukaran sosial akan selalu didasarkan pada ide, bahwa orang memandang hubungan</p> | <p>Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif Kualitatif yang merupakan salah satu strategi dalam</p> |

| | | | | |
|---|--|------------------------|---|---|
| | | | mereka dalam konteks sosial. | sebuah penelitian kualitatif. |
| Persamaan/Perbedaan | | | | |
| <p>Penelitian ini memiliki Kesamaan Perspektif Pertukaran Sosial dalam Perilaku Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Malang 2013. Perbedaan penelitian penulis ini membahas tentang relasi pertukran sosial antara kandidat pada pemilihan kepala desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2020.</p> | | | | |
| 4 | Perilaku Memilih Masyarakat pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal 2010 | Muhammad Riska Aditama | Dari kasus responden diatas menggambarkan kepada kita adanya hubungan simbiosis mutualisme antara perilaku individu dengan struktur sosial disekitarnya. Memahami perilaku politik masyarakat perlu menggunakan pendekatan integrasi antara teori pertukaran Homans dan Peter M Blau. | Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. |
| Persamaan/Perbedaan | | | | |
| <p>penelitian ini memiliki Kesamaan Memahami perilaku politik masyarakat perlu menggunakan pendekatan integrasi antara teori pertukaran Homans dan Peter M Blau. Perbedaan penelitian penulis ini membahas tentang relasi pertukran sosial antara kandidat pada pemilihan kepala desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2020.</p> | | | | |
| 5 | Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 | Yuningsih Dan Subekti | Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2008-2013 di tiga desa yaitu di desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang bertipologi tradisional, di desa Cimekar kecamatan Cieleunyo Kabupaten Bandung yang bertipologi transisional dan di desa Cipacing | metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang bertipologi modern telah berlangsung secara relatif demokratis. | |
| Persamaan/Perbedaan | | | | |
| <p>penelitian ini memiliki Kesamaan dengan penelitian penulis mengenai pembahasan demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Perbedaan penelitian penulis ini membahas tentang relasi pertukaran sosial antara kandidat pada pemilihan kepala desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2020.</p> | | | | |

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Nofal Liata (2020) Relasi Pertukaran Sosial antara Masyarakat dan Partai Politik, ia menjelaskan bahwa Pola hubungan pertukaran sosial saling mendapatkan keuntungan bagi partai politik dengan masyarakat, ada dua kelompok yang berkepentingan dalam konteks ini, (1) elit partai politik berkepentingan ke masyarakat, dan (2) masyarakat desa berkepentingan ke partai politik. Bentuk kepentingan elit partai mendapatkan dukungan suara banyak saat pemilu. Demikian juga kepentingan masyarakat, harus mendatangkan manfaat langsung ke desa. Dua kepentingan ini bertemu dalam ruang negosiasi politik transaksional.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Mohammad Hamdan Asrorudin Pertukaran Sosial Elit Pendukung dan Pasangan Calon Pada Pilkada: Studi Kasus Kemenangan Syahto Pada Pilkada Tulungagung 2018, peneliti tersebut menjelaskan Hubungan antar individu maupun kelompok tidak lepas dari adanya pertukaran sosial, dalam berbagai lini kehidupan termasuk dalam konteks perpolitikan. Salah satu contoh terjadi padapemilihan bupati Tulungagung 2018. Meskipun calon bupati terkena

operasi tangkap tangan KPK namun masih mampu memenangkan kontestasi dengan selisih suara yang signifikan. Hal tersebut tidak lepas dari peran elit didalamnya yang juga merupakan tim pemenangannya pada pencalonan periode sebelumnya.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Wimmy Haliim Perspektif Pertukaran Sosial dalam Perilaku Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Malang 2013. Peneliti tersebut menjelaskan bahwa Masyarakat memerlukan pengetahuan politik yang cukup untuk bisa menentukan perilaku dan budaya politik baik. Namun, pertukaran sosial akan selalu didasarkan pada ide, bahwa orang memandang hubungan mereka dalam konteks sosial.

Pada penelitian keempat yang dilakukan oleh Muhammad Riska Aditama Perilaku Memilih Masyarakat pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal 2010. Peneliti menjelaskan bahwa Dari kasus responden diatas menggambarkan kepada kita adanya hubungan simbiosis mutualisme antara perilaku individu dengan struktur sosial disekitarnya. Memahami perilaku politik masyarakat perlu menggunakan pendekatan integrasi antara teori pertukaran Homans dan Peter M Blau.

Pada penelitian kelima yang dilakukan oleh Wahyuningsih dan Subekti Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. Peneliti menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2008-2013 di tiga desa yaitu di desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya yg bertipologi tradisional, di desa Cimekar kecamatan Cieleunyo

Kabupaten Bandung yang bertipologi transisional dan di desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang bertipologi modern telah berlangsung secara relatif demokratis.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pertukaran Sosial

Pertukaran sosial adalah suatu hubungan sosial dalam masyarakat antara satu dengan yang lainnya dan dalam hubungan sosial terdapat ganjaran dan imbalan yang saling mempengaruhi. Jadi orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya.

Blau dalam Tamtelahitu (2011: 331), menjelaskan bahwa pertukaran sosial merupakan proses pertukaran atau transaksi antar individu yang meningkat ke deferensiasi status dan kekuasaan yang mengarah ke legitimasi dan perorganisasian yang menyebarkan bibit dari oposisi dan perubahan (pertukaran antar individu dan kelompok dalam struktur sosial).

Selanjutnya pertukaran sosial menurut Homans dalam Tamtelahitu (2011 : 30), merupakan hubungan pertukaran antar satu orang dengan orang lain yang akan mengharapkan imbalan yang diterima oleh setiap pihak dimana imbalan yang akan diterima sebanding dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan (makin tinggi pengorbanan, makin tinggi imbalannya, dan keuntungan yang diterima oleh setiap pihak harus sebanding dengan investasinya).

2.2.2 Syarat-Syarat Pertukaran Sosial Dalam Perspektif Teori Pertukaran

Sementara itu menurut Zuber dalam (Liata, 2020: 81), bahwa syarat pertukaran sosial setidaknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut ini:

1. Hubungan simbiosis mutualisme yang saling mendapatkan keuntungan para calon kandidat dengan masyarakat, yang mudah terlihat adalah seperti kehadiran para calon kandidat di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk pendampingan masyarakat, para calon kandidat melakukan berbagai kegiatan seperti: bakti sosial, perbaikan gang misalnya, pengecoran parit, pengecatan mushalla. Selain itu para calon kandidat juga menjanjikan mereka akan berusaha menghadirkan pembangunan fasilitas umum infrastruktur-infrastrukturnya (perbaikan gang misalnya, pengecoran parit, pengecatan mushalla, dan lain sebagainya). Semua upaya yang dilakukan oleh para calon kandidat ini bukanlah semata-mata pemberian secara gratis, di balik semua itu di antara kandidat dengan masyarakat telah melakukan kesepakatan pertukaran sosial antara para calon kandidat dengan masyarakat. Kesepakatan tersebut adalah berupa keuntungan untuk masing-masing kemudian atas kegiatan hubungan politik.
2. Sudut lain, sebab terjadinya transaksi politik praktis atau hubungan “pertukaran yang saling mendapatkan keuntungan” tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat yang berpendapatan rendah, (kondisi kemiskinan). Salah satu dari kesimpulan Ahmad Zuber mengenai kemiskinan, ia mengatakan bahwa “kemiskinan adalah fungsional dalam sistem sosial karena menekankan status-status dalam masyarakat yang di nilai dapat menunjang kesinambungan masyarakat.” (Zuber, 2012). Jadi antusiasme tidak semata-mata dikarenakan faktor kesamaan pandangan antara para calon kandidat dengan masyarakat, keuntungan dalam hubungan tersebut juga menjadi magnet utama, di karenakan kondisi kampanye adalah dimana saatnya para calon kandidat mengeluarkan uang dalam rangka menarik simpati masyarakat dalam rangka kampanye, maka uang tersebut yang di keluarkan harus setara dengan jumlah dukungan suara yang dibutuhkan untuk dapat memenangkan pemilihan tersebut.
3. Pola hubungan terbangun berkaitan dengan kepentingan para calon kandidat dan kepentingan masyarakat, sangat berkemungkinan ada pertimbangannya “upah-hadiah” atau reward. Hal yang demikian merupakan realitas yang tidak bisa di hindari, terlebih lebih masyarakat yang serba materialis sekarang ini, sehingga yang mendasari perilaku adalah pertimbangan ekonomis dan kenyamanan psikologis. lebih luas lagi oleh Homans menyampaikan bahwa “yang di pertukarkan tidak hanya uang, tetapi juga barang-barang lain, seperti: penerimaan, kerelaan, martabat, cinta, perasaan dan lain sebagainya yang bukan materialistis (Susilo, 2008).

4. Dalam keseharian masyarakat, hampir semua interaksi sosial baik individu sesama individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok sulit melepaskan orientasi kepentingan. Dalam konteks yang demikian, segala sesuatu hubungan selalu akan di ukur berdasarkan untung rugi. Dalam perspektif sosiologi politik, fenomena bantuan politis dipahami sebagai wujud sistem pertukaran sosial yang biasa terjadi dalam realitas permainan politik. Karena interaksi politik memang meniscayakan sikap seseorang untuk dipenuhi oleh pengharapan timbal balik atau *reciprocity*. *Reciprocity* adalah persetujuan untuk saling memberi dan menerima, atau menjual dan membeli, keadaan saling berbalas. Dengan kata lain, relasi resiprositas merupakan dasar bagi terciptanya sistem pertukaran sosial yang seimbang, hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan.

2.2.3 Bentuk-Bentuk Pertukaran Pertukaran Sosial

Bentuk pola-pola hubungan pertukaran sosial terbagi ke dalam beberapa spesifik, tergantung pola tersebut kapan dan seperti apa berlangsungnya, dan apa yang menjadi unsur pendukungnya, sebagai syarat agar pertukaran sosial itu bisa terjadi. Berikut adalah bentuk pola-pola hubungan pertukaran sosial beserta unsur pendukung di dalamnya, yang melibatkan keluarga para calon yang memiliki nama tenar di kalangan masyarakat. Susilo (2008 : 92) dalam Liata (2020) sebagai berikut:

1. Pola pertukaran sosial yang di dalamnya memuat dana langsung sebagai perangsang adalah pertukaran sosial model lama, hal ini dilakukan sebagai bukti untuk menunjukkan keseriusan oleh para calon kandidat agar proses pertukaran tersebut memang harus berjalan, dan kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Bagi masyarakat keuntungan tersebut hanya berdampak pada jangka pendek, sedangkan bagi para calon kandidat hasil dari upaya itu akan berdampak pada jangka panjang, dan bisa menunjang jenjang kariernya.
2. Pola hubungan pertukaran sosial transaksional, melibatkan nama tenar sebagai sarana utama. Nama tenar di jadikan sebagai pemikat dengan masyarakat luas, ketenaran nama seseorang di jadikan modal untuk jenjang karier politik dari bawah. Nama seseorang yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas karena ia sering melibatkan diri dalam berbagai urusan-urusan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga ke provinsi.

3. Pola hubungan pertukaran sosial, melibatkan tokoh berpengaruh. Tokoh adalah kunci untuk masuk ke dalam suatu kelompok atau ke dalam suatu masyarakat. Para calon kandidat akan lebih memilih tokoh masyarakat yang berpengaruh sebagai mitra komunikasi politik. Secara sederhana tokoh masyarakat inilah yang menjabarkan tipologi masyarakat yang ia kenal kepada para kandidat calon kepala desa. Baik dari segi kebutuhan masyarakat, hambatan, peluang, dan potensi masyarakat, tokoh masyarakat inilah yang memahami itu. Para calon hanya mengikuti saran dan masukan dari tokoh tersebut.
4. Pola hubungan pertukaran sosial transaksional, melibatkan nama tenar sebagai sarana utama. Nama tenar di jadikan sebagai pemikat dengan masyarakat luas, ketenaran nama seorang akan di jadikan modal untuk jejang karier politik dari bawah. Nama seseorang yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas karena ia sering melibatkan diri dalam berbagai urusan-urusan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga ke tingkat provinsi. Keterlibatannya itu baik dalam hal pengurusan, telah menjadi modal investasi untuk memperkuat jaringan. Oleh sebab itu seorang seseorang yang tidak memiliki modal dana sebagai sumber mobilisasi untuk pendukungnya. tetapi ia memiliki jaringan yang luas sebagai modal utamanya, dan telah di kenal oleh banyak kalangan agar dapat memuluskan pertukaran sosial transaksional itu bisa berlangsung, di samping itu juga sebagai pemikat.
5. Ketika kedua belah pihak sudah menemukan titik temu antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan para calon kandidat, maka hubungan pertukaran sosial itu pun berjalan. Pola hubungan pertukaran sosial tersebut membahas strategi penggalangan massa dengan melakukan janji, harapan, barang, uang dan hal apa yang bisa masyarakat dapatkan. Dengan catatan tujuan utama memenangkan kepentingan para calon kandidat terlebih dahulu baru kemudian realisasi kepentingan masyarakat luas.

Dari Sisi Lain Terdapat Tiga Bentuk Pertukaran Seperti Di Kemukakan oleh West dan H. Turner dalam Djaja (2013: 4), Sebagai berikut :

1. Pertukaran langsung, timbal balik dibatasi pada kedua aktor yang terlibat.
2. Pertukaran tergeneralisasi, melibatkan timbal balik yang bersifat tidak langsung. Seseorang memberikan kepada yang lain, dan penerima merespon tetapi tidak kepada orang pertama.
3. Pertukaran produktif, kedua orang mengalami pengorbanan dan mendapatkan penghargaan secara simultan.

2.2.4 Teori Pertukaran (Exchange Teori)

Proses interaksi sosial dapat memunculkan suatu fenomena baru akibat dari interaksi tersebut. Sekalipun ia mengakui proses interaksi, namun ia juga mempersoalkan bagaimana cara menerangkan fenomena yang muncul dari proses interaksi (Wirawan, 2012).

Teori pertukaran sosial adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar individu berdasarkan tatanan sosial tertentu objek yang ditukarkan tidak berbentuk benda nyata, namun hal-hal yang tidak nyata.

Menurut Blau, tidak semua perilaku manusia di bimbing oleh pertukaran sosial, tetapi dia berpendapat memang demikian. Social Exchange yang dimaksudkan dalam teori Blau ialah terbatas tindakan yang tergantung pada reaksi-reaksi penghargaan dari orang lain dan dalam tindakan akan berhenti apabila reaksi-reaksi yang diharapkan tidak kunjung muncul (<https://www.gurupendidikan.co.id>, diakses pada tanggal 12 jam 19:30 Wib Januari 2020).

Menurut Homans dalam Wirawan, (2012: 176) Adapun prinsip-prinsip teori pertukaran sosial ini adalah sebagai berikut :

1. Satuan analisis yaitu satuan yang diamati dalam penelitian dan memainkan peran penting dalam menjelaskan tatanan sosial dan individu.
2. Motif pertukaran sosial diasumsikan bahwa setiap orang mempunyai keinginan sendiri. Setiap orang akan memerlukan sesuatu tetapi itu tidaklah merupakan tujuan yang umum. Artinya orang melakukan pertukaran karena termotivasi oleh gabungan berbagai tujuan dan keinginan yang khas.
3. Faedah atau keuntungan berbentuk biaya yang dikeluarkan seseorang akan memperoleh suatu "hadiah" (*reward*) yang terkadang tidak

memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. *Cost* dapat didefinisikan sebagai upaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan kepuasan ditambah dengan *reward* apabila melakukan sesuatu. Kepuasan atau *reward* yang diperoleh seseorang itu dapat dinilai sebagai sebuah keuntungan.

4. Pengesahan sosial merupakan suatu pemuas dan merupakan motivator yang umum dalam sistem pertukaran. Besarnya ganjaran tidak diberi batasan karena sifatnya individual dan emosional. *Reward* adalah ganjaran yang memiliki kekuatan pengesahan sosial (*social approval*).

Hal yang demikian merupakan realitas yang tidak bisa di hindari, terlebih-lebih masyarakat yang serba materialis sekarang ini, sehingga yang mendasari perilaku adalah pertimbangan ekonomis dan kenyamanan masyarakat.

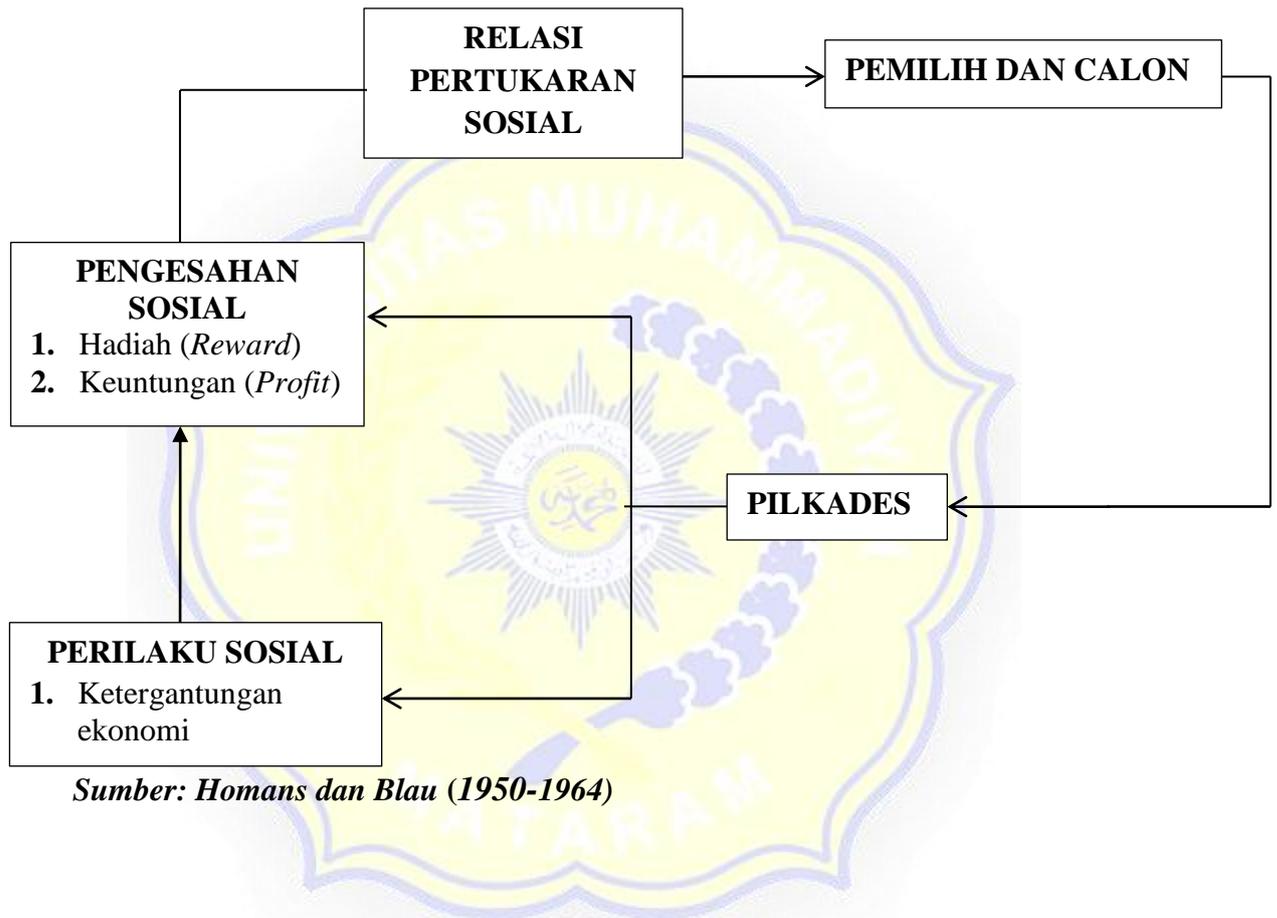
Lebih luas lagi oleh Homans dalam Susilo (2008: 81) menyampaikan bahwa yang di pertukarkan tidak hanya uang, tetapi juga barang-barang lain, seperti: penerimaan, kerelaan, martabat, cinta, perasaan dan lain sebagainya yang bukan materialistis.

Adapun objek-objek yang di pertukarkan bukanlah benda yang nyata saja, melainkan hal-hal yang tidak nyata juga di pertukarkan. Jadi pertukaran sosial itu sangat berkemungkinan terjadi tidak hanya ketika menjelang pemilu maupun pilkada akan tetapi di tingkat desa terjadi relasi pertukaran, juga bisa terjadi tergantung kesepakatan antara para calon kandidat yang melakukan pertukaran sosial tersebut.

Dan hal yang di pertukarkan adalah berupa barang yang bernilai bagi orang yang membutuhkan, dan tidak harus dalam bentuk materi atau uang. (Susilo, 2008 : 92).

2.3 Kerangka Pikir

Tabel 2.1
Kerangka Pikir



2.4 Definisi Konseptual

1. Faktor yang mempengaruhi pertukaran sosial yaitu Pengesahan Sosial. Pengesahan sosial merupakan suatu pemuas dan merupakan motivator yang umum dalam sistem pertukaran. Besarnya ganjaran tidak diberi batasan karena sifatnya individual dan emosional. *Reward* adalah ganjaran yang memiliki kekuatan pengesahan sosial (*social approval*).
2. Faktor yang mempengaruhi politik uang yaitu Perilaku Sosial. Perilaku Sosial yaitu tindakan yang tergantung pada reaksi-reaksi penghargaan dari orang lain dan dalam tindakan ini akan berhenti apabila reaksi-reaksi yang diharapkan tidak kunjung muncul.

Tabel 2.2
Devinisi Operasional

| No | Variabel | Indicator | Sumber data |
|----|-------------------|---|-------------------------|
| 1 | Pengesahan Sosial | Hadiah (<i>Reward</i>) Relasi jangka pendek | 1. Skunder 2. Primer |
| | | Keuntungan (<i>Profit</i>) Relasi jangka pendek | |
| 2 | Perilaku Sosial | Ketergantungan | 1. Skunder 2. Primer |
| | | Ekonomi Sosial | |

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan (Moleong, 2018: 6).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak cukup dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadang kala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh kebalik sesuatu yang nyata tersebut (Moleong, 2018: 6).

Penelitian kualitatif dimanfaatkan untuk memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang juga digunakan untuk lebih dapat memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui. Tipe penelitian ini dianggap sangat efektif untuk dipakai karena menggambarkan keadaan obyek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.

3.3 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian berlangsung selama kurang lebih selama 2 minggu dimulai pada 25 bulan Januari Tahun 2021 sampai dengan bulan Perbuari Tahun 2021.

3.4 Tehnik Penentuan Narasumber

Menurut Sugiyono (2018) dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*, adapun yang dimaksud *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang atau subyek tersebut dianggap paling tau tentang apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga dapat memudahkan peneliti mendapatkan informasi atau tentang situasi yang diteliti.

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

| No | Narasumber | Jumlah |
|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 1 | Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa | 1 |
| 2 | Tokoh Masyarakat (agama) | 2 |
| 3 | Kandidat Calon Kepala Desa | 5 |
| 4 | Masyarakat Pemilih | 5 |
| Total | | 13 |

3.5 Jenis Data

Secara harafiah data berarti fakta atau kenyataan. Akan tetapi, dalam penelitian istilah data dipakai dalam arti yang lebih luas, karena disamping data primer peneliti sosiologi juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan pustaka, seperti monografi dan laporan penelitian. Dengan demikian untuk penelitian sosiologi istilah data lebih dipakai dalam arti keterangan informasi, bahan atau rumus-rumus yang menjadi bahan dasar penelitian untuk diolah dan dianalisis sehingga kita dapat menarik (beberapa) kesimpulan.

Menurut Nuzulla Agustina, data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf-huruf yang menyatakan sesuatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi.

Jenis data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu data Primer dan data sekunder:

1. Data Primer

“Data primer adalah data yang berasal dari lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti.

Data primer menurut Soerjono Soekanto, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan diperoleh dengan cara langsung dari sumber Pertama dilapangan melalui penelitian di lapangan yaitu perilaku masyarakat.

Tabel 3.4.2
Unit Analisis Data Primer

| No | Variabel | Indicator | Bentuk Data | Sumber Data |
|----|-------------------|---|--|--|
| 1 | Pengesahan Sosial | Hadiah (<i>Reward</i>) relasi jangka pendek | ✓ Bentuk hadiah (jangka pendek) ✓ Pemberian/Kehormatan/jabatan (jangka panjang) | ✓ Tokoh Masyarakat (agama) ✓ Tokoh pemuda ✓ Calon Kepala Desa ✓ Panitia Pemilihan |
| | | Keuntungan (<i>Profit</i>) relasi jangka pendek | ✓ Proyek/program (jangka panjang) | |
| 2 | Perilaku Sosial | Ketergantungan ekonomi | ✓ Menerima imbalan (barang/uang) | ✓ Calon Kepala Desa ✓ Panitia Pemilihan |
| | | Ketergantungan Terhadap Elite (Sosial) | ✓ Pengaruh elite, kepatuhan terhadap tokoh | |

2. Data Sekunder

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder berupa : rancangan peraturan perundang undangannya, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif?.

Tabel 3.4.3
Unit Analisis Data Skunder

| No | Variabel | Indicator | Bentuk Data | Sumber Data |
|----|-------------------|---|---|--|
| 1 | Pengesahan Sosial | Hadiah (<i>Reward</i>) relasi jangka pendek | ✓ Daftar Calon Kepala Desa | ✓ Tokoh Masyarakat (agama) ✓ Tokoh pemuda ✓ Calon Kepala Desa ✓ Panitia Pemilihan |
| | | Keuntungan (<i>Profit</i>) relasi jangka pendek | ✓ Hasil Rekapitulasi Hasil Pemilihan ✓ Foto-foto saat pemberian hadiah | |
| 2 | Perilaku Sosial | Keuntungan | ✓ Dokumen janji/kontrak komitmen | |
| | | Ekonomi Sosial | | |

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui halil kerja pancaindra mata serta di bantu pancaindra lainnya.

Menurut Kartono, pengertian Observasi ialah: “Studi yang disengaja dan sistematis tetang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan”.

3.6.2 Wawancara

Menurut Esterberg, mendefinisikan Interview sebagai berikut; “ *a meeting of two persons to exchange information and idea thought question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”.

“Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”

Berikut beberapa narasumber yang akan peneliti wawancarai:

| No | Nama Narasumber | Keterangan |
|----|------------------|----------------|
| 1. | A. Rahim Isma'il | Calon Kandidat |
| 2. | Muhdar Ibrahim | Calon Kandidat |
| 3. | M. Tayeb Sene | Calon Kandidat |
| 4. | Arifudin S.Pd | Calon Kandidat |
| 5. | Suprianto S.Pd | Calon Kandidat |

| | | |
|----|---------------|------------------|
| 6. | Asriadin S.Pd | Tokoh Pemuda |
| 7. | Drs. Mihdoan | Tokoh Masyarakat |

3.6.3 Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh melalui catatan tertulis, fakta yang terarsip, seperti catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan sebagainya.

3.7 Teknik Analisis data

Analisis data kualitatif, Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2018: 280), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun Proses analisis data dilakukan yaitu dengan beberapa tahapan, sebagai berikut :

3.7.1 Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan upayah membuat rangkuman yang poko, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan

alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya menyajikan data sesuai dengan pokok-pokok permasalahan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti berupaya mencari makna dari data yang dihasilkan dalam penelitian, serta menganalisa data dan kemudian membuat kesimpulan. Verifikasi atau penarikan kesimpulan ditempuh guna memadatkan dari keseluruhan informasi data yang ada menjadi lebih singkat dan mudah untuk dipahami tanpa mengurangi esensi yang ada.